KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH BERIMPLIKASI DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014)

Oleh:
Irma Sintia

Pembimbing:

Ony Widilestariningtyas

Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2017

ABSTRAK

Laju pertumbuhan ekonomi yang rendah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Dimana, tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kemandirian keuangan daerah. Adapun fenomena yang terjadi yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi tidak diikuti tingginya penerimaan pendapatan asli daerah sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah dan implikasinya terhadap kemandirian keuangan daerah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (*path anaysis)* dengan bantuan *software Statistical Product Service Solutions (SPSS)* Versi 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan asli daerah dan menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penciptaan terhadap kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (Andreas, 2013). Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud (Fuadi, 2016:114). Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Gebriyani, 2013).

Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara (Diana dan Elvira, 2015). Semakin baik perekonomian atau semakin meningkat nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dalam perekonomian maka kemampuan atau potensi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi akan semakin meningkat (Faishal, 2016).

Adapun fenomena yang peneliti temukan berdasarakan Data Statistik Keuangan atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Laporan PDRB pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat yaitu dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Kebumen sebesar 13,37%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kabupaten Grobogan sebesar 9,35%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu Kota Semarang sebesar 12,05%. Sedangkan kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kota Pekalongan sebesar 2,26%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi yaitu Kabupaten Kebumen sebesar 13,37%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kota Pekalongan sebesar 2,26%.

Sementara itu, pada tahun 2014, kabupaten yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Jepara sebesar 36,11%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar -24,08%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kota Surakarta sebesar -0,46%. Sedangkan kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kota Salatiga sebesar -13,16%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Jepara sebesar 36,11%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar -24,08%.

Sedangkan pada tahun 2014, dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Semarang sebesar 12,00%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 2,77%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar 41,29%. Sedangkan kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kota Magelang sebesar 3,42%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar 41,29%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 2,77%.

Adapun fenomena yang peneliti temukan adalah fenomena yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 dimana kedua kabupaten tersebut menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, namun Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Seharusnya semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka akan Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin tinggi. Adapun fenomena lainnya yaitu fenomena yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2014 dimana Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terbilang sangat rendah, namun Kemandirian Keuangan Daerahnya cukup tinggi. Seharusnya ketika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan semakin rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan identifikasi yang didapat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014?
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan data mengenai Kemandirian Keuangan Daerah Berimplikasi dengan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahkan rujukan dan referensi bagi pengembangan konsep tentang bagaimana kemandirian keuangan daerah berimplikasi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan konsep kerangka berpikir yang telah dibangun, masalah pada tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diperbaiki dengan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah akan meningkat dan lebih baik lagi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti maupun peneliti lain. Serta menjadi referensi baru bagi peneliti lain dan khususnya untuk pengembangan ilmu akuntansi keuangan daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut P. Eko Prasetyo (2012:18), Pertumbuhan Ekonomi merupakan Salah satu indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan oleh suatu negara khususnya bagi negara yang sedang berkembang. Adapun menurut Iskandar Putong (2013:1), Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. Sedangkan menurut Julius R. Latumaerissa (2015:23), Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek yaitu proses, *output* per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan *output* per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal yaitu *output* total (GNP) dan jumlah penduduk, karena *output* per kapita adalah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan *output* per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup.

Menurut Muammil Sun'an (2015:27), produk domestik bruto pada umumnya digunakan sebagai indikator baik buruknya perekonomian sebuah negara dan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Ali Ibrahim Hasyim (2016:203), perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diamati melalui besaran PDB (Produk Domestik Bruto) yang dicapai oleh kegiatan perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun.

Menurut Asfia Murni (2015:175) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Alam
3. Sumber Daya Modal
4. Teknologi dan Inovasi

Adapun menurut Pratama dan Mandala (2014:148) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa adalah:
1. Barang modal
2. Tenaga Kerja
3. Teknologi
4. Manajemen
5. Kewirausahaan
6. Informasi

Menurut P. Eko Prasetyo (2012:18), cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\Delta PDB_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: P. Eko Prasetyo (2012:18)

Dimana:
ΔPDB_t = Laju pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*)
PDB = Produk Domestik Bruto

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut Aries Djaenuri (2012:88), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun menurut Baldric Siregar (2015:31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :
1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah itu sendiri meliputi:
   a. Pajak hotel
   b. Pajak restoran
   c. Pajak hiburan
   d. Pajak reklame
   e. Pajak penerangan jalan
   f. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
   g. Pajak lingkungan
   h. Pajak mineral bukan logam dan batuan
   i. Pajak parkir
   j. Pajak sarang burung walet
   k. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
   l. BPHTB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah meliputi:

a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan beban cetak akta catatan sipil
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
f. Retribusi pelayanan pasar
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
i. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
j. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
k. Retribusi jasa usaha terminal
l. Retribusi jasa usaha tempat potong hewan
m. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
n. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Sedangkan menurut Aries Djaenuri (2012:88) Kelompok pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan dalam menghitung Pendapatan Asli Daerah adalah Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*). Menurut Abdul Halim (2008:241), rasio pertumbuhan adalah:

> "Digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya".

Menurut Abdul Halim (2008:241), pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung menggunakan:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt} - (\text{t} - 1) \text{ x } 100\%}{\text{PAD t} - 1}$$

Sumber: Abdul Halim (2008:241)

Dimana:

t = Tahun Berjalan
t-1 = Tahun Sebelumnya

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2013:5), Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun menurut Abdul Halim (2001:167), Kemandirian Keuangan Daerah adalah daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Menurut Abdul Halim (2007:323) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Selain itu, menurut Abdul Halim (2007 : 25) ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hessel Nogi (2007: 89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untk meningkatkan penerimaan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2007:96) “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri. Menurut Mahmudi (2010:142), semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Menurut Abdul Halim (2007: 232) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat/Provinsi dan Piniaman}} \times 100\%$$

Sumber: Abdul Halim (2007:232)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Abdul Halim, 2004:188) memperkenalkan empat macam pola hubungan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, 2004: 189

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhdapa Pendapatan Asli Daerah

Menurut Diana dan Elvira (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, atau sebaliknya semakin menurun pertumbuhan ekonomi daerah maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah. Persamaan regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen diprediksi akan meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 176.707.924.086. Sedangkan menurut Ismail Rasulong (2012) dan Miragustia (2015) yang menyatakan bahwa Produk domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Adapun menurut Yenny dkk (2016) dan Andi (2016) menyatakan bahwa produk domestik regional bruto atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Akhmad Imam Amrozi (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan rasio kemandirian dan kemampuan mobilisasi daerah, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PAD suatu daerah menggambarkan kemampuan atau tigkat kesejahteraan masyarakat dalam membayar pajak dan pungutan lainnya. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemandirian suatu daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Adapun menurut Eka dkk (2015) Menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar PAD yang diperoleh pemerintah daerah maka Kinerja Keuangannya semakin baik atau semakin mandiri, karena dengan meningkatnya PAD pemerintah daerah dapat memenuhi pembiayaannya untuk belanja daerah. Sedangkan menurut Rizka Lutfita Novalistia (2016) menunjukkan bahwa pajak daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah yang termasuk ke dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Sedangkan retribusi daerah yang termasuk kedalam komponen pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Secara teoritis bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah. Secara teoritis menurut penulis bahwa apabila daerah, provinsi atau kota yang mampu menghasilkan retribusi daerah yang tinggi tentunya dapat membantu menciptakan kemandirian keuangan pada masing-masing daerah.

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64), menjelaskan definisi hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1 = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
H_2 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2), Metode Penelitian adalah Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2016:19) Metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematik.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan signifikansi antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2017:147), Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Menurut Mashuri dalam Umi Narimawati (2010:29), Metode Verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Menurut Sugiyono (2017:8), Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2017:39), Operasionalisasi Variabel adalah suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Maka terdapat tiga variabel yang akan diukur, yaitu:

1. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel Independen (bebas) adalah Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Pertumbuhan Ekonomi (X).

2. Variabel *Intervening*

Menurut Sugiyono (2017:40), Variabel *Intervening* (penghubung) adalah Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *intervening* adalah pendapatan asli daerah (Y).

3. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2017:39), Variabel Dependen (terikat) adalah Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kemandirian keuangan daerah (Z).

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017:137), bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder. Menurut Sugiyono (2017:137), Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2016:21), data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku - buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang dikumpulkan telah diolah oleh pihak ketiga atau pihak lain. Sumber sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Penerimaan dan Laporan PDRB atas Harga Berlaku Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:224), Teknik Pengumpulan Data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data-data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (2013-2014) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literature-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, artikel mengenai hubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Riset Internet (*Online Research*)

Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur, jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81), Sampel adalah Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun menurut Sugiyono (2017:85), *Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2017:147), Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.5.2 Analisis Verifikatif

Menurut Masyhuri (2009:45), Metode Verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data menurut V. Wiratna (2015:121), analisis data adalah upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur.

3.6.1 Jalur Analisis Path (*Path Analysis*)

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2014:2), *Path analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui perubahan langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen). Analisis jalur (*path analysis*) digunakan terhadap keterkaitan variabel X dengan Y, dan variabel Y dengan variabel Z menggunakan rancangan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun langkah-langkah menguji *path analysis* adalah sebagai berikut:

1) Analisis Korelasi

Menurut Rachmat Trijono (2015: 60) korelasi adalah derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih dari data hasil pengamatan.

2) Analisis Determinasi

Menurut Amos Neolaka (2014:130), koefisien determinasi adalah kadar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (r^2, R^2).

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan path analisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sebelum membahas pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, terlebih dahulu akan dibahas mengenai perkembangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014.

4.1.1 Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi adalah dengan menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut ini adalah data mengenai Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2014

No.	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Keterangan
1	Kab. Cilacap	6,56%	Rendah
2	Kab. Banyumas	11,32%	Tinggi
3	Kab. Purbalingga	13,28%	Tinggi
4	Kab. Banjarnegara	13,02%	Tinggi
5	Kab. Kebumen	13,37%	Tinggi
6	Kab. Purworejo	10,44%	Rendah
7	Kab. Wonosobo	11,42%	Tinggi
8	Kab. Magelang	11,34%	Tinggi
9	Kab. Boyolali	12,02%	Tinggi
10	Kab. Klaten	12,58%	Tinggi
11	Kab. Sukoharjo	10,55%	Rendah
12	Kab. Wonogiri	11,52%	Tinggi
13	Kab. Karanganyar	10,86%	Rendah
14	Kab. Sragen	12,08%	Tinggi
15	Kab. Grobogan	9,35%	Rendah
16	Kab. Blora	11,50%	Tinggi
17	Kab. Rembang	12,03%	Tinggi
18	Kab. Pati	10,33%	Rendah
19	Kab. Kudus	11,72%	Tinggi
20	Kab. Jepara	11,32%	Tinggi
21	Kab. Demak	10,29%	Rendah
22	Kab. Semarang	12,30%	Tinggi
23	Kab. Temanggung	11,47%	Tinggi
24	Kab. Kendal	11,61%	Tinggi
25	Kab. Batang	12,26%	Tinggi
26	Kab. Pekalongan	10,73%	Rendah
27	Kab. Pemalang	12,11%	Tinggi
28	Kab. Tegal	11,26%	Tinggi

29	Kab. Brebes	12,58%	Tinggi
30	Kota. Magelang	10,54%	Rendah
31	Kota. Surakarta	10,24%	Rendah
32	Kota. Salatiga	11,27%	Tinggi
33	Kota semarang	12,05%	Tinggi
34	Kota. Pekalongan	2,26%	Rendah
35	Kota. Tegal	7,55%	Rendah
Target Kabupaten/Kota		**11,00%**	**-**
Kabupaten Terendah		**9,35%**	**-**
Kabupaten Tertinggi		**13,37%**	**-**
Kota Terendah		**2,26%**	**-**
Kota Tertinggi		**12,05%**	**-**
Kabupaten dan Kota Terendah		**2,26%**	**-**
Kabupaten dan Kota Tertinggi		**13,37%**	**-**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2017)

Tabel diatas menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2014, rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,00%. Dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yaitu Kabupaten Kebumen sebesar 13,37%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kabupaten Grobogan sebesar 9,35%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar 12,05%. Sedangkan kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kota Pekalongan sebesar 2,26%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yaitu Kabupaten Kebumen sebesar 13,37%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi terendah yaitu Kota Pekalongan sebesar 2,26%.

4.1.2 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Pendapatan Asli Daerah yaitu rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini adalah data mengenai Pendapatan Asli Daerah beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014.

Tabel 4.2
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Pertumbuhan PAD	Kemampuan Daerah
1	Kab. Cilacap	-17,47%	Rendah
2	Kab. Banyumas	3,04%	Tinggi
3	Kab. Purbalingga	31,95%	Tinggi
4	Kab. Banjarnegara	4,57%	Tinggi

5	Kab. Kebumen	-3,52%	Rendah
6	Kab. Purworejo	5,89%	Tinggi
7	Kab. Wonosobo	-0,98%	Rendah
8	Kab. Magelang	-22,32%	Rendah
9	Kab. Boyolali	12,87%	Tinggi
10	Kab. Klaten	-13,04%	Rendah
11	Kab. Sukoharjo	-7,15%	Rendah
12	Kab. Wonogiri	25,62%	Tinggi
13	Kab. Karanganyar	-11,55%	Rendah
14	Kab. Sragen	-5,94%	Rendah
15	Kab. Grobogan	19,90%	Tinggi
16	Kab. Blora	26,18%	Tinggi
17	Kab. Rembang	10,39%	Tinggi
18	Kab. Pati	2,42%	Tinggi
19	Kab. Kudus	16,12%	Tinggi
20	Kab. Jepara	36,11%	Tinggi
21	Kab. Demak	14,78%	Tinggi
22	Kab. Semarang	-17,80%	Rendah
23	Kab. Temanggung	-3,02%	Rendah
24	Kab. Kendal	14,36%	Tinggi
25	Kab. Batang	-24,08%	Rendah
26	Kab. Pekalongan	3,54%	Tinggi
27	Kab. Pemalang	-9,79%	Rendah
28	Kab. Tegal	15,47%	Tinggi
29	Kab. Brebes	13,59%	Tinggi
30	Kota. Magelang	-8,74%	Rendah
31	Kota. Surakarta	-0,46%	Rendah
32	Kota. Salatiga	-13,16%	Rendah
33	Kota semarang	-11,46%	Rendah
34	Kota. Pekalongan	-8,79%	Rendah
35	Kota. Tegal	-5,80%	Rendah
Kabupaten Terendah		**-24,08%**	**-**
Kabupaten Tertinggi		**36,11%**	**-**
Kota Terendah		**-13,16%**	**-**
Kota Tertinggi		**-0,46%**	**-**
Kabupaten dan Kota Terendah		**-24,08%**	**-**
Kabupaten dan Kota Tertinggi		**36,11%**	**-**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2017)

Tabel diatas menjelaskan pendapatan asli daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2014, rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 2,05%. Dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Jepara sebesar 36,11%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar -24,08%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kota Surakarta sebesar -0,46%. Sedangkan kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kota Salatiga sebesar -13,16%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Jepara sebesar 36,11%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terendah yaitu Kabupaten Batang sebesar -24,08%.

4.1.3 Analisis Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Berikut ini adalah data mengenai Kemandirian Keuangan Daerah beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014.

Tabel 4.3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian	Kemampuan Daerah
1	Kab. Cilacap	6%	Rendah Sekali
2	Kab. Banyumas	9,31%	Rendah Sekali
3	Kab. Purbalingga	8,27%	Rendah Sekali
4	Kab. Banjarnegara	4,54%	Rendah Sekali
5	Kab. Kebumen	4,40%	Rendah Sekali
6	Kab. Purworejo	4,97%	Rendah Sekali
7	Kab. Wonosobo	5,21%	Rendah Sekali
8	Kab. Magelang	6,14%	Rendah Sekali
9	Kab. Boyolali	7,32%	Rendah Sekali
10	Kab. Klaten	4,01%	Rendah Sekali
11	Kab. Sukoharjo	10,04%	Rendah Sekali
12	Kab. Wonogiri	4,77%	Rendah Sekali
13	Kab. Karanganyar	6,70%	Rendah Sekali
14	Kab. Sragen	4,48%	Rendah Sekali
15	Kab. Grobogan	6,78%	Rendah Sekali
16	Kab. Blora	2,77%	Rendah Sekali

17	Kab. Rembang	5,70%	Rendah Sekali
18	Kab. Pati	4,82%	Rendah Sekali
19	Kab. Kudus	9,10%	Rendah Sekali
20	Kab. Jepara	4,20%	Rendah Sekali
21	Kab. Demak	7,43%	Rendah Sekali
22	Kab. Semarang	12,00%	Rendah Sekali
23	Kab. Temanggung	4,89%	Rendah Sekali
24	Kab. Kendal	7,15%	Rendah Sekali
25	Kab. Batang	4,85%	Rendah Sekali
26	Kab. Pekalongan	3,38%	Rendah Sekali
27	Kab. Pemalang	4,06%	Rendah Sekali
28	Kab. Tegal	6,94%	Rendah Sekali
29	Kab. Brebes	4,23%	Rendah Sekali
30	Kota. Magelang	3,42%	Rendah Sekali
31	Kota. Surakarta	21,00%	Rendah Sekali
32	Kota. Salatiga	6,50%	Rendah Sekali
33	Kota Semarang	41,29%	Rendah
34	Kota. Pekalongan	8,45%	Rendah Sekali
35	Kota. Tegal	11,43%	Rendah Sekali
Rata-Rata		**7,64%**	-
Kabupaten Terendah		**2,77%**	-
Kabupaten Tertinggi		**12,00%**	-
Kota Terendah		**3,42%**	-
Kota Tertinggi		**41,29%**	-
Kabupaten dan Kota Terendah		**2,77%**	-
Kabupaten dan Kota Tertinggi		**41,29%**	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (data diolah, 2017)

Tabel diatas menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah yang diukur melalui Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2014, rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 7,64%. Dari seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kabupaten Semarang sebesar 12,00%. Sedangkan kabupaten yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 2,77%. Dari seluruh kota di Provinsi Jawa Tengah, kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar 41,29%. Sedangkan kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kota Magelang sebesar 3,42%. Dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten/kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar 41,29%. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 2,77%.

4.1.4 Hasil Pengujian Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan melalui uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov dengan hasil pengujian nilai probabilitas yang di lihat dari nilai Asymp Sig. untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0,735 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,912, dan untuk variabel Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,650. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

4.1.5 Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan asli Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program *Statistical Product Service Solutions* (SPSS) Versi 16 di peroleh hasil analisis verifikatif pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi (r_{yx})= 0,556 Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi maka hal tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan begitupun sebaliknya.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 30,91%, sedangkan sisanya sebesar 69,09% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.6 Hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program *Statistical Product Service Solutions* (SPSS) Versi 16 di peroleh hasil analisis verifikatif pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

1. Nilai koefisien korelasi (r_{yx})= 0,504 Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah memiliki hubungan sedang. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka hal tersebut akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan begitupun sebaliknya.
2. Nilai koefisien determinasi (parsial) pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebesar 25,4%, sedangkan sisanya sebesar 74,6% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.7 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dengan menggunakan program *SPSS* 16.0, diperoleh hasil pengujian hipotesis parsial (Uji t) yaitu nilai t_{hitung} untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,845. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 32, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,030. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,845 > 2,030) dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,001, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah hanya 0,1% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak

H_0. Kesimpulannya, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

2. Pengujian Hipotesis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan menggunakan program *SPSS* 16.0, diperoleh hasil pengujian hipotesis parsial (Uji t) yaitu nilai t_{hitung} untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,354. Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (df) = 32, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,030. Sehingga dapat disimpulkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,354 > 2,030) dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini juga ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji statistik untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,002, artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah hanya 0,2% atau berarti lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat di terima sebesar 5% sehingga dapat diputuskan untuk menolak H_0. Kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 menunjukkan fluktuasi di setiap kabupaten dan kota. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,556 artinya Pertumbuhan Ekonomi memilki hubungan sedang dengan Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi maka hal tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan begitupun sebaliknya.

Kemudian besar presentase pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 30,91%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 69,09% yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah seperti jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, penerapan otonomi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 dimana kedua kabupaten tersebut menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, namun Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Seharusnya semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka akan Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin tinggi. Dari fenomena tersebut, menunjukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif namun setelah dilakukan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif atau dapat dikatakan ketika Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah pun secara otomatis akan mengalami peningkatan dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini pun menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Diana dan Elvira (2015), Ismail Rasulong (2012) dan Miragustia (2015) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 menunjukkan fluktuasi di setiap kabupaten dan kota. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebesar 0,504 artinya Pendapatan Asli Daerah memilki hubungan sedang dengan Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini terlihat dari nilai korelasi berada diantara 0,40 hingga 0,599 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka hal tersebut akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan begitupun sebaliknya. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah maka Kinerja Keuangannya semakin baik atau semakin mandiri, karena dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dapat memenuhi pembiayaannya untuk belanja daerah.

Kemudian besar presentase pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebesar 25,4%. Dilihat dari hasil tersebut, maka pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah kurang dominan. Artinya terdapat faktor lain sebesar 74,6% yang dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, dan lain-lain.

Kondisi tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2014 dimana Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah terbilang rendah, namun Kemandirian Keuangan Daerahnya cukup tinggi. Seharusnya ketika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga akan semakin rendah. Dari fenomena tersebut, menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah memiliki hubungan yang negatif namun setelah dilakukan penelitian ini dapat dibuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah memiliki hubungan yang positif atau dapat dikatakan ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka Kemandirian Keuangan Daerah pun secara otomatis akan mengalami peningkatan dan begitupun sebaliknya.

Hasil penelitian ini pun menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Imam Amrozi (2016), Eka dkk (2015), dan Rizka Lutfita Novalistia (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pengaruh Pendapatn Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Terdapat Hubungan yang sedang dan bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi maka hal tersebut akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan begitupun sebaliknya. Fenomena khusus yang terjadi yaitu di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 dimana kedua kabupaten tersebut menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, namun Pendapatan Asli Daerah masih rendah. Seharusnya semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin tinggi.

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Terdapat hubungan yang sedang dan bersifat positif artinya, setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka hal tersebut akan meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan begitupun sebaliknya. Fenomena khusus yang terjadi yaitu di Kota Semarang pada tahun 2014 dimana Pendapatan Asli Daerah yang diukur melalui rasio pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah terbilang cukup tinggi, namun Kemandirian Keuangan Daerahnya masih rendah. Seharusnya semakin tinggi ketika Pendapatan Asli Daerah, maka Kemandirian Keuangan Daerah juga kan semakin tinggi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1. Saran Praktis

Untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang lebih baik terkait pengawalan pembangunan infrastruktur supaya dapat terlaksana dengan baik. Dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kemudian untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebaiknya dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

5.2.2. Saran Akademis

1) Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menambah informasi yang terbaru bagi perkembangan ilmu akuntansi keuangan khususnya mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Implikasinya pada Kemandirian Keuangan Daerah.

2) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini. Selain itu, penulis menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah objek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

_____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

_____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, *Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta.

Abdul Halim dan Ibnu Subiyanto. 2008. *Seri Bunga Rampai Manajemen keuangan Daerah: Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Abdul Halim dan M. Kusufi Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.

Abdul Halim dan M. Kusufi Syam. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Akhmad Imam Amrozi. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada*

Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi Volume I No. 1, Februari 2016 ISSN 2502 – 3764.

Ali Ibrahim Hasyim. 2016. *Ekonomi Makro (Edisi Pertama)*. PT. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.

Amos Neoloka. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. PT. Remaja Pusdakarya. Bandung.

Andi Abdul Wahab, Rusdiah Iskandar dan Irwansyah. 2016. *Influence Of Government Investment And Private Investment And Labor Against Domestic Product Gross Regional And Own Local Revenue Samarind. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen.* Volume 12, (2), 2016 ISSN print: 0216-7786, ISSN online: 2528-1097.

Andreas Marzel Pelealu. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012.* Jurnal Emba 1189 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 1189-1197.

Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.* Ghalia Indonesia. Bogor.

Asfia Murni. 2015. *Ekonomi Makro (Edisi Revisi)*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2014. *Statistik Indonesia Tahun 2011-2015*. Badan Pusat Statistik. Bandung.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Indonesia Tahun 2013-2014*. Badan Pusat Statistik. Bandung.

Baldric Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual).* UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Danang Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Diana Sari dan Elvira Desiani. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Volume 1 No. 1, Maret 2015 ISSN: 2460-030X.

Eka Sintala Dewi Ajani, Akram dan Lilik Handajani. 2015**.** *Hubungan Pad, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol 1, No 1 (2015) P-ISSN: 0216-9517 E-ISSN: 2460-8505.

Faishal Fadly**.** 2016. *Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah*?. JIEP-Vol. 19, No 2, November 2016 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.

Fuadi. 2016. *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh, Ed.1.* CV BUDI UTAMA. Yogyakarta.

Gebriany Pirade Wenur. 2013*. Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung.* Issn 2303-1174. Jurnal Emba Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 626-633.

Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2007. Manajemen Publik. PT.Grasindo. Jakarta.

Iskandar Putong. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Ismail Rasulong. 2012. *Implikasi Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar*. Jurnal Ekonomi Balance Volume 8 No. 2 Desember 2012 ISSN 1858-2192 – 139.

Julius R.Latumaerissa. 2015. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global.* Penerbit : Mitra Wacana Media. Jakarta.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Masyhuri dan Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. PT Refika Aditama. Bandung.

Miragustia Mayza, Raja Masbar dan Muhammad Nasir. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 3, No. 1, Februari 2015 ISSN 2302-0172 pp. 9-16.

Muammil Sun'an. 2015. *Ekonomi Pembangunan.* Mitra Wacana Media. Jakarta.

P. Eko Prasetyo. 2012. *Fundamental Makro Ekonomi.* Beta Offset. Yogyakarta.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. 2014. *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.

Rachmat Trijono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Papas Sinar Sinanti. Depok.

Riduwan dan Engkos Ahmad Kuncoro. 2014. *Cara Mudah Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Alfabeta. Bandung.

Rizka Lutfita Novalistia. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah. (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014).* Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016. ISSN: 2502-7697.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*: *Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi pada Fakultas Ekonomi UNIKOM*. Genesis. Jakarta.

V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Yenni Del Rosa, Ingra Sovita dan Idwar. 2016. *Analisis Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2000 – 2014.* Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 18 No 1 Januari 2016 ISSN 1693 – 3273.